



SD Kanisius Condongcatu menggelar Usaha Berkreasi Keluarga Kanisius Condongcatu atau disebut 'Ubek Kekancon' Kamis (20/6). Even ini merupakan agenda semesteran SD Kanisius Concet sekaligus penerapan P5. Kepala SD tersebut, Paulina mengatakan, 'Ubek Kekancon' dimeriahkan penampilan siswa kelas 1-6 dan bazaar sebagai ajang aktivitas yang melibatkan anak-anak dan para orangtua.

KEKERASAN DI ERA DIGITAL Keluarga-Sekolah Kunci Lindungi Anak

JAKARTA (KR) - Di era digitalisasi yang kian berkembang pesat, anak-anak tak luput dari bahaya yang mengintai, salah satunya kekerasan yang bisa terjadi di ruang-ruang digital dan berujung pada kekerasan secara langsung. Hal ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Untuk melindungi anak, mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah yang merupakan lingkup terdekat anak-anak sehari-hari.

Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio mengatakan, tren kasus kekerasan terhadap anak selama ini melibatkan orang-orang terdekat sebagai pelaku. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan protektif menjadi langkah penting yang perlu dilakukan orang tua, guru, hingga masyarakat sekitar.

"Di sini pentingnya lingkungan yang protektif dan aman, yakni orang-orang yang terdekat dengan anak seperti keluarga, orang tua, guru dan teman-temannya," ujar Astrid dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema 'Perlindungan Anak dalam Ruang Digital', Rabu (19/6).

Selain itu, Astrid juga menekankan pentingnya pemahaman dan tindakan nyata dalam mencegah kekerasan terhadap anak di dunia digital melalui berbagai strategi dan pendekatan yang meli-

batkan semua pihak. "Pertama kita bisa mengacu pada undang-undang yang dibuat pemerintah, khususnya yang relevan saat ini adalah UU tentang kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di dunia digital," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada satu tempat di negara manapun yang tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Perbedaan, setiap negara memiliki sistem pelaporan dan penanganan yang komprehensif. "Sistem pelaporan dan penanganan yang tuntas itulah yang perlu kita adopsi," ucap Astrid.

Di Indonesia, sistem pelaporan sudah diejawantahkan dalam wujud hotline SAPA 129 dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di lebih dari 300 kabupaten dan kota. Namun khusus UPTD PPA, berdasarkan monitoring dan evaluasi pihaknya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP-PA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Astrid menyebut, masih ada pekerjaan rumah dari segi kualitas pelayanan dan aksesibilitas. (Ari)-f

ANGGARAN SEKOLAH KEDINASAN Panja DPR Dorong Hitung Kembali

JAKARTA (KR) - Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar menghitung kembali alokasi anggaran sekolah kedinasan dan non-kedinasan untuk tahun anggaran mendatang.

"Panja mendorong pemerintah melalui Kemendikbudristek agar Bappenas dan Kemenkeu melaksanakan PP No 18/2022 tentang Pendanaan Pendidikan, antara lain melalui penghitungan kembali alokasi anggaran pendidikan oleh kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan non-kedinasan dalam penyusunan RAPBN tahun mendatang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) Panja Pembiayaan Pendidikan bersama Ke-

mendikbudristek dan Kemendagri, Rabu (19/6). Dorongan tersebut merupakan salah satu poin kesimpulan dari RDP yang dihadiri perwakilan Kemendikbudristek dan Kemendagri. Sebelumnya, persoalan anggaran sekolah kedinasan merupakan salah satu hal yang disoroti Panja Pembiayaan Pendidikan dalam rapat tersebut. Dede Yusuf menilai, besaran anggaran yang dialokasikan kepada sekolah kedinasan berbeda jauh atau *jomplang* dengan anggaran pendidikan non-

kedinasan yang dialokasikan dari Kemendikbudristek. "Ada kedinasan-kedinasan yang masuk kuliah di bayar penuh sampai beragam semuanya dibayar, masuk kedinasan langsung diterima. Tapi banyak juga akhirnya tidak diterima dan dengan pembiayaan yang standarnya tidak mengunggulkan standar Kementerian Pendidikan, sehingga terjadi disparitas juga antara dosen-dosennya yang mengajar di Kementerian Pendidikan dan dosen-dosen yang mengajar di ke-

menterian/lembaga lainnya," kata Dede. Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yulianti memaparkan data alokasi anggaran untuk setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) atau sekolah kedinasan pada setiap tahunnya. "Bisa kita lihat betapa besarnya anggaran per mahasiswa per tahun yang dialokasikan. Bahkan, ada yang sampai Rp 67.000.000 (rata-rata per mahasiswa per tahun). Jadi kalau kita lihat sangat tinggi betul sekali Pak Pimpinan, sangat tinggi padahal ini sama-sama warga negara Indonesia," ujar Kiki. (Ant)-f

UMY Tambah Guru Besar Ilmu Komunikasi

BANTUL (KR) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menambah guru besar baru, yakni Dr Adhianty Nurjanah MSi, yang Rabu (19/8) menerima Surat Keputusan (SK) Guru Besar bidang Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat dan Pemerintah. Penyerahan SK Guru Besar dilaksanakan di Lobi Rektor UMY, Gedung AR Fachrudin A.

Rektor UMY Prof Dr Gunawan Budiyo menyatakan, pencapaian ini bukan hanya sekadar penambahan jumlah guru besar. Tetapi, juga merupakan upaya bersama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap UMY. Melihat perkembangan



Rektor UMY menyerahkan SK Guru Besar kepada Dr Adhianty.

teknologi dan komunikasi digital yang pesat memerlukan peran strategis dari akademisi untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam strategi komunikasi global. "Penambahan guru besar ini bukti nyata akun-

tabilitas kita kepada masyarakat. Selain komitmen untuk terus berkembang di bidang ilmu komunikasi," ungkap Gunawan. Kepala LLDikti V Prof Setyabudi Indarto, menggarisbawahi pentingnya

peran ilmuwan muslim dalam menghadapi perubahan di dunia ilmu komunikasi. Ilmuwan muslim, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perspektif baru dalam ilmu sosial yang seringkali didominasi teori-teori barat. Dengan bertambah satu guru besar, UMY kini memiliki 46 profesor dari 208 guru besar di wilayah LLDikti V. UMY menjadi perguruan tinggi swasta dengan jumlah guru besar terbanyak di wilayah DIY. Selain itu, UMY juga memiliki 126 Lektor Kepala, 306 Lektor dan 314 Doktor, yang semuanya berkontribusi signifikan dalam pengembangan akademik dan penelitian. (Fsy)-f

EKONOMI

BPPS Siap Promosikan Wisata Sleman Barat

SLEMAN (KR) - Tak seperti pariwisata di sisi timur dan utara Sleman, potensi wisata di Sleman barat belum begitu terdengar. Padahal, ada banyak potensi menarik yang bisa jadi pilihan bagi masyarakat. Baik wisata alam, perikanan, pertanian, budaya, kuliner dan lainnya.

Pengembangan dan promosi wisata di kawasan Sleman Barat kini tengah diupayakan oleh Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) dengan menggelar Famtrip, Kamis (20/6). Famtrip diikuti beberapa pihak seperti Dinas Pariwisata, Asita, PWI Sleman dan mahasiswa.

Beberapa tempat menarik di Seyegan dikunjungi. Lokasi pertama adalah Go-Blik Farm, kandang peternakan dan industri susu kambing perah di Kurahan Kidul Margodadi. Di sini banyak hal bisa dilakukan pengunjung mulai melihat proses pengembangbiakan kambing dan proses pemerahan susu. Ada 350 kambing yang dipelihara di peternakan ini dan semua kambing kualitas tinggi sebagai penghasil susu kambing.

Destinas kedua, rombongan menaiki kereta kelinci diantar menuju desa wisata Grogol. Di lokasi ini, peserta famtrip diajak melihat suasana asri di sekitar Desa Wisata Grogol dan membuat wayang suket. Setelah itu menuju desa wisata Cibuk Kidul untuk belajar pengelolaan sampah dan budidaya minapadi.

Anggota BPPS Muhammad Iqbal Yusron mengatakan, tahun ini pihaknya

mendapat tugas untuk mengembangkan wisata Sleman Barat. Karena selama ini, kawasan Sleman Barat belum banyak terlihat gaungnya, berbeda dengan sisi timur dan utara.

"Sebenarnya ada cukup banyak potensi di Sleman barat. Contohnya Grogol yang dikenal sebagai desa wisata budaya dan warganya sangat peduli dengan kesenian wayang. Juga ada desa wisata Cibuk Kidul yang pernah meraih penghargaan dari FAO tapi belakangan menurun aktivitasnya, sehingga sekarang dikembangkan lagi untuk minapadi dan pengolahan sampah," ungkap Iqbal.

Pengelola Go-Blik Farm, Ratna menambahkan, kandang peternakan kambing sering mendapatkan kunjungan dari sekolah dan perguruan tinggi untuk belajar budidaya kambing dan produksi susu. "Impian kami ke depan ingin mengembangkan eduwisata," katanya.

Kepala Dispar Sleman Ishadi Zayid berharap peserta Famtrip bisa turut serta mempromosikan destinasi, kuliner, dan atraksi yang ada Sleman. Khususnya Sleman Barat. Hal itu sejalan dengan tagline yang diusung, Dolan Sleman Marai Tuman

"Harapannya dengan famtrip ini, potensi pariwisata di Sleman dapat dieksplor kemudian bisa jadi perpanjangan tangan. Apalagi ada tujuh mahasiswa asing yang ikut menjadi peserta," ungkapnya. (Yud)-f



Peserta Famtrip menyaksikan proses pemerahan susu kambing.

JIKA SUDAH DIBUAT REGULASINYA Kementan Siap Budidaya Tanaman Kratom

JAKARTA (KR) - Kementerian Pertanian (Kementan) masih menunggu regulasi tata kelola tanaman kratom, yang disebut memiliki kandungan narkotika, tetapi berpotensi besar diekspor karena manfaat kesehatannya.

Isu mengenai tata kelola, tata niaga dan legalitas tanaman kratom dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diikuti sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6).

"Kita tadi ratas tentang kratom. Dari sisi pertanian untuk sementara ini masuk ke tanaman hutan, tetapi saran kami nanti kalau regulasinya sudah diatur, mungkin kita bisa budidaya, sehingga nilai ekonomi dan kualitasnya meningkat," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Dalam rapat tersebut di-

bahas penurunan harga kratom yang disebabkan banyak faktor, antara lain kualitas produk, distribusi dan sebagainya. Jika nantinya pemerintah menetapkan tata kelola kratom di bawah Kementan, Amran menyatakan siap melakukan pembinaan kepada para petani dan membentuk korporasi, sehingga ada jaminan kualitas produk, terutama untuk diekspor.

"Ini kan tanaman di hutan, nanti bisa kita budidayakan, bisa kita tata, tetapi dalam bentuk korporasi. Kalau ada koperasi mengelola ini, kita korporasikan, sehingga kualitas dan kuantitas terjamin karena itu syarat untuk

ekspor," ujar Amran. Ia meyakini dengan adanya regulasi yang jelas, budidaya tanaman kratom bisa lebih berkembang, karena potensi ekonominya sangat besar yaitu pernah mencapai 30 dolar AS per kilogram. "Sekarang ini harganya jatuh 2 dolar hingga 5 dolar, ini terlalu rendah," kata Amran.

Tata kelola dan tata niaga tanaman kratom dibahas pemerintah untuk merespons keluhan masyarakat, terutama 18 ribu keluarga di Kalimantan Barat yang kesulitan mengeksport kratom, karena belum ada pengaturan mengenai standarisasi produknya. Berdasarkan data Ke-

menterian Perdagangan pada periode Januari-Mei 2023, negara utama tujuan ekspor kratom adalah Amerika Serikat dengan nilai 4,86 juta dolar AS dan proporsi mencakup 66,3 persen dari total ekspor. Tujuan ekspor lainnya yakni Jerman dengan 0,61 juta dolar AS, disusul India sebesar 0,44 juta dolar AS, dan Republik Ceko dengan 0,39 juta dolar AS.

Daun kratom diketahui memiliki kandungan aktif yaitu alkaloid mitragynine dan 7-hydroxymitragynine. Kedua bahan aktif ini memiliki efek sebagai obat analgesik atau pereda rasa sakit. Senyawa aktif mitragynine yang terkandung dalam kratom inilah yang berpotensi menimbulkan kecanduan lakannya mengonsumsi narkotika. (Ant)-f

BI Rate Tetap 6,25 Persen

JAKARTA (KR) - Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, di Jakarta, Kamis (20/6).

Kebijakan ini didukung penguatan operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan masuknya aliran modal asing. Dikatakan, BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

(GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang lebih kuat.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan mencapai 3,2 persen, lebih tinggi dari prakiraan awal, terutama dengan lebih baiknya pertumbuhan India dan Tiongkok. Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh kuat ditopang perbaikan permintaan domestik dan peningkatan ekspor dengan penurunan inflasi AS yang masih berjalan lambat. Kondisi ini mendorong Fed Fund

Rate (FFR) diprakirakan baru akan turun pada akhir tahun 2024. Sementara itu, European Central Bank (ECB) telah menurunkan suku bunga kebijakan moneternya lebih cepat sejalan dengan tekanan inflasi yang lebih rendah. Divergensi kebijakan moneter negara maju ini serta masih tingginya ketegangan geopolitik menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi.

Berbagai perkembangan tersebut dan dengan tingginya yield US treasury, menyebabkan menguatnya nilai tukar dolar AS, sehingga meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. (Lmg)-f